

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Mukthie Fadjar, *Tipe Negara Hukum*, Malang: Bayu Media, 2005.

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 2004.

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai teori-teori pengantar dan beberapa komentar)*, Mahakarya Rangkang Offset Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia*, Pradnya Paramita. Jakarta, 1993.

Atmadja, Asikin R.Z. Kesuma, *Pembatasan Rentenir sebagai Perwujudan Pemerataan Keadilan*, Varia Peradilan Tahun II, No. 27, Februari, 1967.

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Simposium Hukum Perdata Nasional, Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 21 – 23 Desember 1981*.

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Stora Grafika, 2002).

H Muchsin, *Ikhtisar Ilmu Hukum* (Jakarta: Badam Penerbit Iblam, 2006), hlm. 123.

Hamzah Halim, *Cara Praktis Memahami dan Menyusun Legal Audit dan Legal Opinion*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustitia, Yogyakarta, 2009.

Hermien Hardiati Koeswadji, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-asas kasus dan permasalahannya*, Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1980.

Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Perjanjian*, Yogyakarta, LaksBang Mediatama, 2008.

I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana (Materi Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana)*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, 2011.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, alih bahasa Sumardjo (Jakarta: Erlangga. 1986).

Khairandi, Ridwan, *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, Universitas Indonesia, Pascasarjana, 2003.

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, SinarGrafika, 2012.

Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Malian, Sobirin, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*: Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2000.

Moh Khasan, *Prinsip-Prinsip Keadilan Hukum Dalam Asas Legalitas Hukum Pidana Islam*, Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 1, April 2017.

Mubaryanto dan Suratmo M. Suparmoko, *Metodelogi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: BP FE UGM, 1987.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, edisi V (Jakarta: UI Press. 1993).

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum (Pendekatan Kontemporer)*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

Musa Darwin Pane, *Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Jakarta: Jurnal Media Hukum, Vol 24 No 2, 2017.

- Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Kebijakan Pidana”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Nindyo Pramono, *Problematika Putusan Hakim Dalam Perkara Pembatalan Perjanjian*, Mimbar Hukum. Vol.22. No. 2.
- Nurcholish Madjid, *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi* (Jakarta: Paramadina. 1999).
- Panggabean, R.M. *“Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku”*. Jurnal Hukum. No. 4 Vol. 17. Oktober, 2010.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008.
- Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1998.
- Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Edisi 1 (Jakarta: Granit, 2004).
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas – Asas Hukum Perdata*, PT Alumni, Bandung, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (edisi revisi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Riki Perdana Raya Waruwu, *Penerapan Asas Fiksi Hukum Dalam Perma*, 2017.
- Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003
- Sanusi Bintang dan Dahlan, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Bandung: PT. Citra AdityaBakti, 2000).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).

- Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Intermasa, 1984.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Edisi Baru (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, YogyakartaLibertu, 1986.
- Sutantio, Retnowulan, *Perjanjian Menurut Hukum Indonesia*, Varia Peradilan, 1990, Tahun V, No. 56.
- Teguh Prasetyo, "*Hukum Pidana*", PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Titis Anindyajati dkk, "*Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-Undangan*", Jurnal Konstitusi, XII, 4, (Desember, 2015).
- Tongat, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press: Malang, 2009.
- Tri Wahyu Surya Lestari, *Komparasi Syarat Keabsahan "Sebab Yang Halal" Dalam Perjanjian Konvensional dan Perjanjian Syariah*, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, YUDISIA, Vol. 8, No. 2, Desember 2017.
- W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur Bandung, Cetakan VII, Bandung, 2004.
- Yohanes Sogar Simamora, *Hukum Perjanjian_Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa oleh Pemerintah*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2009.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika, 2007.
- Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia.

Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Website

<https://weeklyline.net/jurnal/20190322/denda-keterlambatan-hukuman-bagi-penyedia-jasa>, diakses tanggal 28 April 2008.

www.kajianpustaka.com.

<http://ilmuef.blogspot.com/2015/11/asas-asas-dalam-hukum-perjanjian.html>.

<http://www.mudjisantosa.net/2020/05/1-denda-keterlambatan-pada-perpres-16.html#more>.

<https://fakpi.org/2018/07/02/denda-keterlambatan-pekerjaan-berdasarkan-perpres-nomor-16-tahun-2018/>.

<https://fokus.tempo.co/read/1106840/polisi-kpk-diminta-usut-penganggaran-proyek-rehabilitasi-sekolah/full&view=ok>.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Perdata.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, diakses tanggal 1 Mei 2020.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>.

<https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt5b07770d798f2/artiasas-personalitas-atau-asas-nasionalitas-aktif-dalam-hukum-pidana>.

<https://magetantoday.com/kejaksaan-ingatkan-ppk-dampak-denda-proyek/>.

[https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20\(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan, diakses tanggal 29 Juni 2020](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/#:~:text=Menurut%20Sudikno%20Mertokusumo%20(2007%20%3A%20160,hukum%20tidak%20identik%20dengan%20keadilan, diakses tanggal 29 Juni 2020).

https://pakdosen.co.id/korupsi-adalah/#Pengertian_Korupsi_Menurut_Para_Ahli.

<https://riaukepri.com/2020/03/04/akademisi-menilai-plt-bupati-bengkalis-bakal-kalah-praperadilan/>.

<https://rmco.id/baca-berita/nasional/29722/terjerat-kasus-korupsi-proyek-bupati-jadi-tahanan-kpk-wakil-bupati-buronan-polisi>.

<https://sumateranews.co.id/kontraktor-lambat-bayar-denda-ppk-diperiksa-jaksa/>.

<https://www.borneonews.co.id/berita/85692-menghitung-denda-pt-prestasi-karyamulya-bagian-3, diakses tanggal 28 April 2008>.

<https://www.cakaplah.com/berita/baca/39271/2019/06/18/tiga-terdakwa-korupsi-pipa-transmisi-divonis-5-tahun-dan-4-tahun-penjara#sthash.A9In30iO.dpbs>.

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19115/fiksi-hukum-harus-didukung-sosialisasihukum-/ 28 April 2008>.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5142a15699512/perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-hukum-pidana/>.

<https://www.metrokaltara.com/kepastian-hukum/>.

<https://www.oketimes.com/news/26845/pembangunan-gedung-labor-olahraga-unp-bau-korupsi-lsm-imd-melapor-ke-kpk.html>.

<https://www.pengadaan.web.id/2020/02/fakta-kasus-korupsi-ppk-dalam-pengadaan-barang-jasa.html>.

<https://www.pengadaanbarang.co.id/2020/01/pengadaan-barang-dan-jasa.html>.

https://www.seputarpengetahuan.co.id/2020/03/hukum-administrasi-negara.html#Related_posts, diakses tanggal 2 April 2020.

